

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, F., N. (2017). "Pentingnya Kompetensi Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.
- Azaria, F. (2019). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Pemangunan Desa. Skripsi.
- Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Echar, S. (2017). Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fitri, S. & Alfi, N. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Garut). Universitas Widyatama.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, M., S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan. 4ed. Selemba Empat.
- Hery. (2014). Akuntansi dasar 1 dan 2. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indra, K. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, N. dan Bambang, S. 2014. Metodologo Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Jesica, W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Utara. Skripsi.
- Kadek, L., S. & Ni, L., G., E. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). E-journal. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.
- Kemenkopmk.go.id. (2022). “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022”.
- Khozin, A. (2018). Model Sistem Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. Sigma-Mu, Vol.10, No.1. Diakses dari <https://jurnal.polban.ac.id>.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” 8(2), 106-115.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal Of Economic, Business And Engineering*, 1(1), 118-130
- Mahayani. (2017). *Prosocial Behavior* dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Kirana. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 129-144.
- Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Musdalifah, M. (2020) Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. Universitas Ahmad Dahlan.
- Natalia, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi.

- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). Kota Denpasar : Universitas Hindu Indonesia
- Rochmi, W., Endang, M. & Andi, D. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: “Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *E-Journal Feb Unmul*. KINERJA 16 (1), 10-21.
- Rosyadi, S. (2016). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Konteks Desentralisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuel. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi.
- Sari. (2020). Tentang pengertian Perangkat Desa. Diakses dari : <http://repository.umko.ac.id>
- Sintia. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi di desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). UIN Malang.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Press
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: *Alfabeta*.
- Sujarweni, W. V. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Akuntansi Pemerintah Desa 657.661. Pustaka Baru Press, 28-29.
- Suwarno. (Juni, 2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. (JRAP) Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Vol,6. No.1, 25-37.

- Syahrul, K., Johnny, H, P., & Salmin, D. (2017). Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounalet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. Journal UNSRAT. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 21(3) 448.
- Tatag, P. Y. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. Diakses dari djpb.kemenkeu.go.id.
- Vika, A. D. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. Diakses dari : databoks.katadata.co.id.
- Widiyatama, Arif dkk. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Artikel Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Volume 2 Nomor 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan desa
- Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 24 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.